



TEORI KEBIJAKAN FISKAL & IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

DISAMPAIKAN OLEH

Dr. Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Depok, 8 Mei 2019



Kerangka Presentasi



Teori Kebijakan Fiskal



**Kebijakan Fiskal
Di Indonesia**



Teori Kebijakan Fiskal



$$GDP = C + I + G + (X - M)$$



Kebijakan Fiskal:

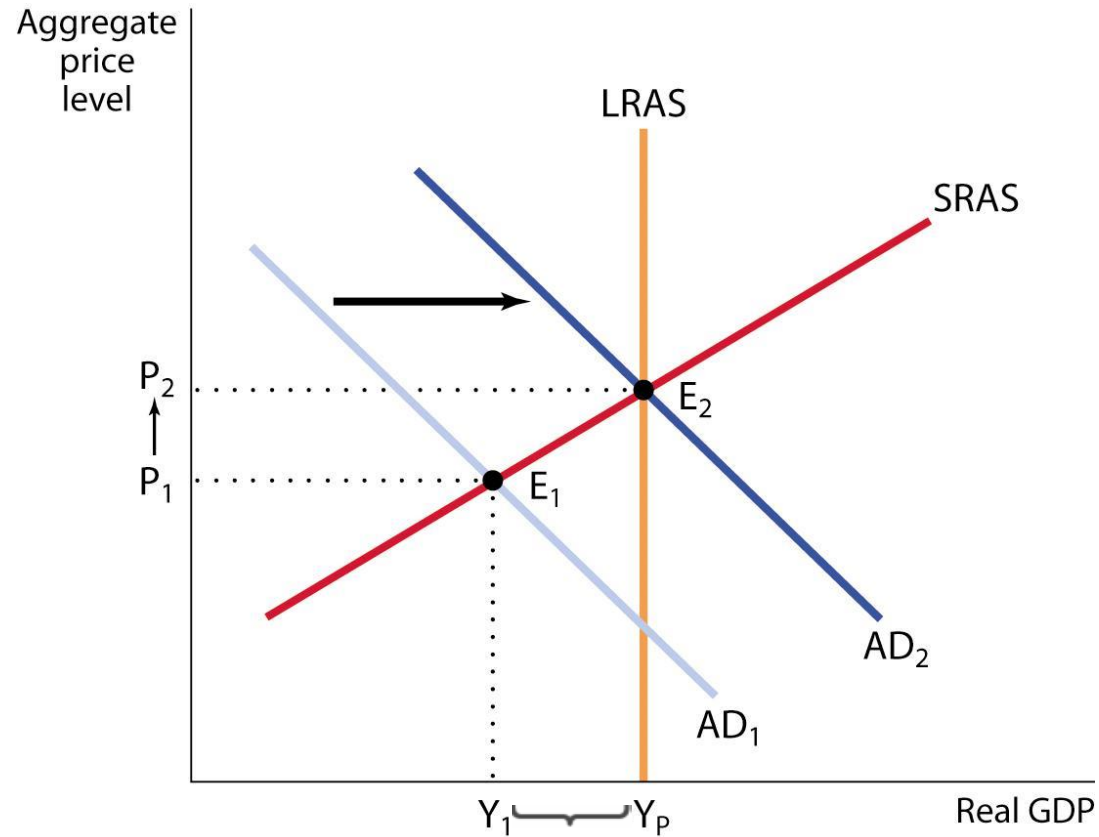
“Penggunaan pajak, transfer Pemerintah, dan belanja Pemerintah untuk barang dan jasa guna menggeser kurva permintaan agregat (*aggregate demand curve*)”.



Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

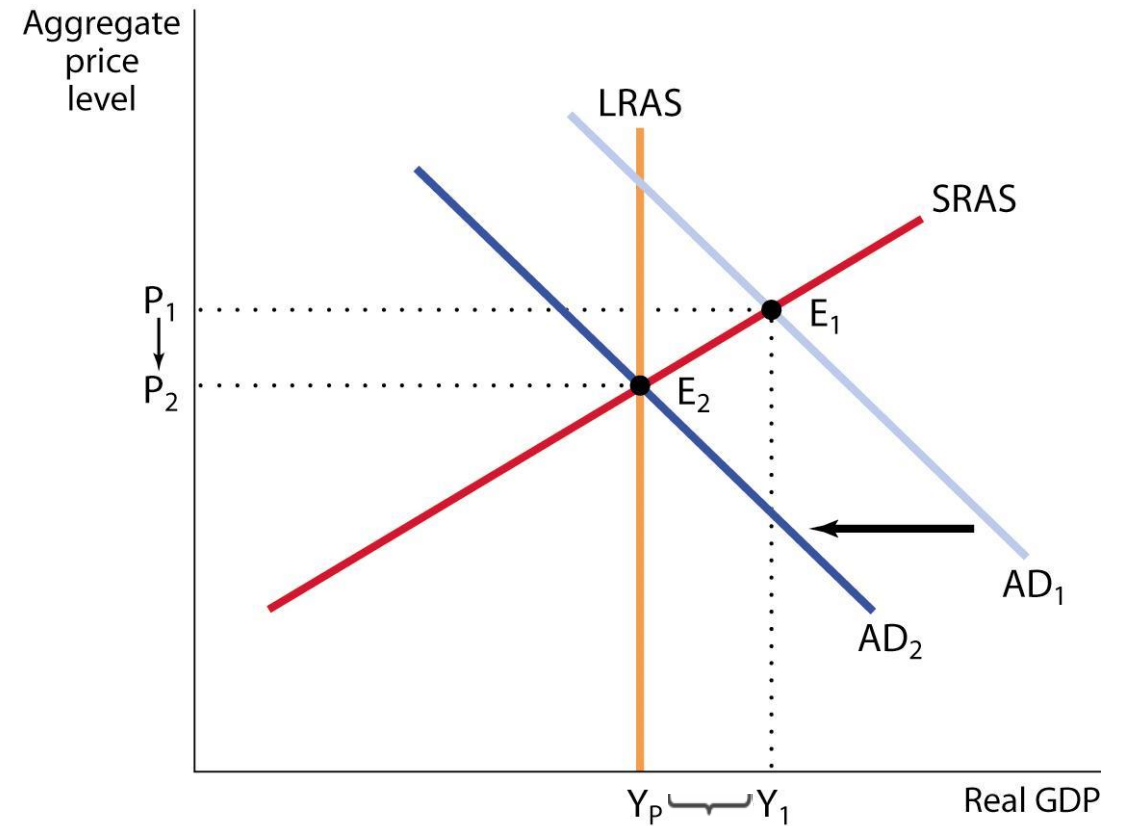


Keb. Fiskal Ekspansif
Meningkatkan *Aggregate Demand*.



Recessionary gap

Keb. Fiskal Kontraktif
Mengurangi *Aggregate Demand*.



inflationary gap



Stimulus Fiskal

“Penggunaan **kebijakan fiskal** untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja”



2 Jenis Stimulus Fiskal



- *Automatic Fiscal Stimulus*



- *Discretionary Fiscal Stimulus*



- **Automatic Fiscal Stimulus** adalah keb. fiskal yang secara otomatis terjadi karena dipicu kondisi ekonomi tanpa campur tangan Pemerintah.
- **Discretionary Fiscal Stimulus** terjadi akibat kebijakan yang diambil oleh Pemerintah/Kongres.



Automatic Stimulus

- Dalam masa resesi, penerimaan pajak menurun sementara belanja meningkat.
- Anggaran Pemerintah menyediakan ***automatic stimulus*** yang membantu memperkecil *recessionary gap*.
- Dalam masa perekonomian ekspansif, penerimaan pajak meningkat dan belanja menurun.
- Anggaran Pemerintah menyediakan ***automatic restraint*** yang membantu memperkecil *inflationary gap*.





Cyclical and Structural Balances



- **Structural surplus** atau **deficit** adalah keseimbangan anggaran yang terjadi jika perekonomian berada dalam kondisi **full employment** dan PDB *real* sebesar PDB *potential*.
- **Cyclical surplus** atau **deficit** adalah kondisi surplus atau defisit aktual dikurangi besaran *structural surplus* atau *deficit*.
- Karena itu, **cyclical surplus** atau **deficit** adalah surplus atau *deficit* yang terjadi karena PDB *real* tidak sama dengan PDB *potential*.

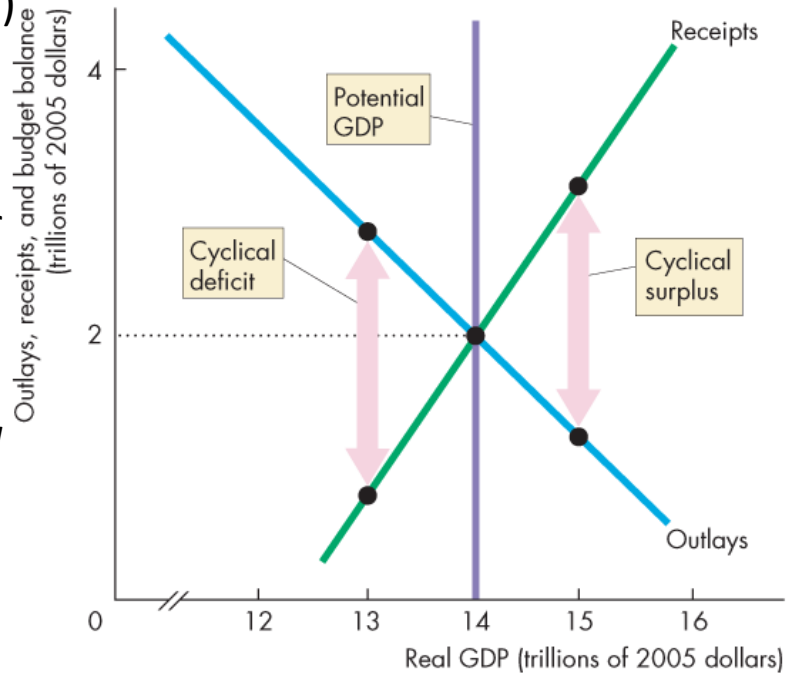


Stimulus Fiskal



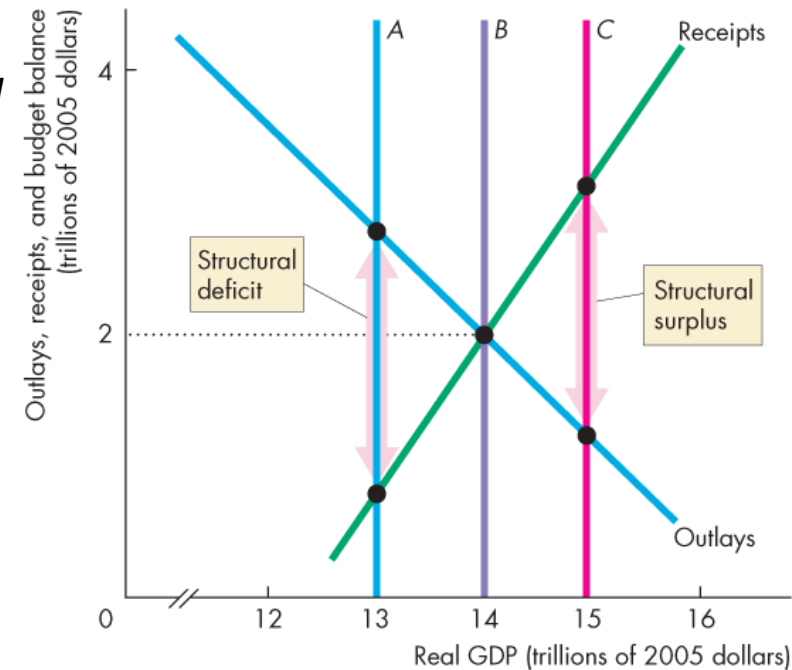
Cyclical dan Structural Balance

- Gambar di samping (a) mengilustrasikan *cyclical deficit* dan *cyclical surplus*.
- PDB potential sebesar \$14 triliun.
- Jika PDB *real* sebesar \$13 triliun, anggaran berada dalam *cyclical deficit*.
- Jika PDB *real* sebesar \$15 triliun, anggaran berada dalam *cyclical surplus*.



(a) Cyclical deficit and cyclical surplus

- Pada gambar di samping (b), jika PDB *real* dan PDB *potential* sebesar \$13 triliun, anggaran berada dalam *structural deficit*.
- Jika PDB *real* dan PDB *potential* sebesar \$14 triliun, anggaran berada dalam kondisi *balanced*.
- Jika PDB *real* dan PDB *potential* sebesar \$15 triliun, anggaran berada dalam *structural surplus*.



(b) Structural deficit and structural surplus



Discretionary Fiscal Stimulus

- Mayoritas *discretionary fiscal stimulus* berfokus pada efeknya terhadap *aggregate demand*.

Stimulus Fiskal & Aggregate Demand

- Perubahan dalam penerimaan dan belanja Pemerintah merubah *aggregate demand* dan memiliki *multiplier effects* dari sisi fiskal yaitu:
 - *Government Expenditure Multipliers*
 - *Tax Multiplier*



Government Expenditure Multipliers



- ***Government expenditure multiplier*** adalah pengaruh kuantitas dari perubahan belanja Pemerintah dalam PDB riil.
- Karena belanja Pemerintah adalah komponen dari *aggregate expenditure*, maka kenaikan dalam belanja Pemerintah akan meningkatkan PDB riil.
- Saat PDB riil naik, penghasilan akan meningkat dan konsumsi juga ikut naik, sebagai akibatnya *aggregate demand* akan naik.
- Jika ini hanya merupakan konsekuensi dari kenaikan belanja Pemerintah, maka *multiplier-nya* akan lebih besar dari 1.

Government Expenditure Multipliers



- Tetapi, pada umumnya kenaikan dalam belanja Pemerintah akan menaikkan utang Pemerintah dan meningkatkan suku bunga riil.
- Dengan biaya pinjaman (*cost of borrowing*) yang lebih tinggi, investasi akan berkurang, yang sedikit banyak menegasikan kenaikan belanja Pemerintah.
- Jika hal tersebut terjadi, maka kenaikan belanja Pemerintah akan menyebabkan *multiplier* kurang dari 1.
- Pengaruh manakah yang lebih kuat?
- Konsensus menyatakan bahwa kemungkinan besar *crowding-out effect* mendominasi sehingga angka *multiplier* adalah kurang dari 1.



Tax Multipliers



- ***Tax multiplier*** adalah dampak dari perubahan pajak terhadap *aggregate demand*.
- *Demand-side effects* dari pemotongan pajak kemungkinan besar lebih kecil daripada kenaikan belanja Pemerintah dengan nilai yang sama.



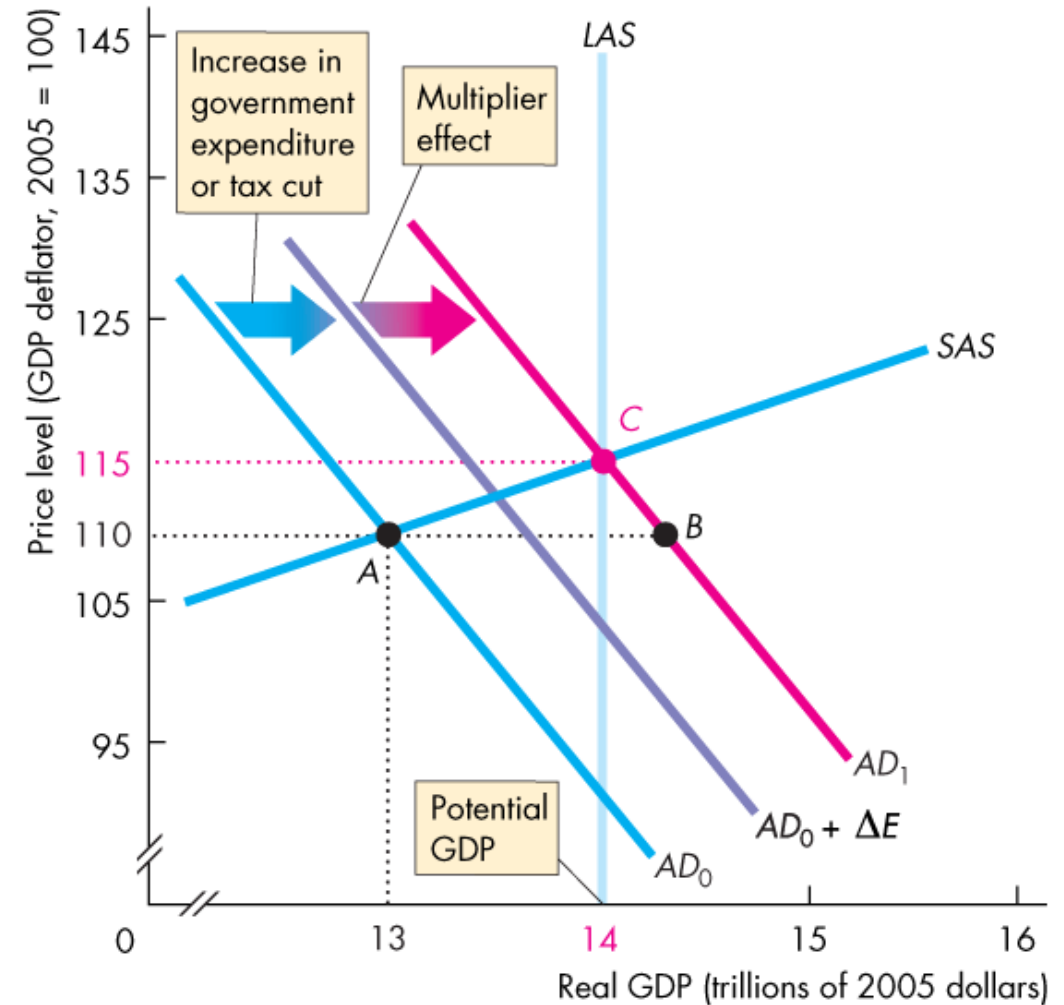
Stimulus Fiskal



Mekanisme Stimulus Fiskal



- Grafik di samping menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal berupa stimulus fiskal berfungsi menutup *recessionary gap*.
- Kenaikan dalam belanja Pemerintah atau potongan pajak akan meningkatkan *aggregate expenditure*.
- *Multiplier* yang tercipta akan meningkatkan *aggregate demand*.





Stimulus Fiskal dan *Aggregate Supply*



- Pajak mendorong terciptanya “wedge” diantara ***cost of labor*** dan ***take-home pay*** serta antara ***cost of borrowing*** dan ***the return on lending***.
- Pajak mengurangi tingkat *employment*, tingkat tabungan dan investasi serta menurunkan PDB riil dan tingkat pertumbuhannya.
- Kebijakan pemotongan pajak mengurangi dampak negatif hal diatas dan meningkatkan PDB riil dan tingkat pertumbuhannya.
- Efek pada sisi penawaran (*supply side*) pada kebijakan pemotongan pajak kemungkinan mendominasi efek *demand-side* dan membuat efek multiplier lebih besar daripada *government expenditure multiplier*.



Stimulus Fiskal dan *Time Lags*

Penggunaan *discretionary fiscal policy* pada umumnya terhambat oleh tiga jenis ***time lags*** sebagai berikut:



Recognition lag— waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan bahwa stimulus fiskal diperlukan.



Law-making lag—waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan Undang-Undang sehingga perubahan belanja atau tingkat pajak dapat diimplementasikan.



Impact lag—waktu yang dibutuhkan agar kebijakan stimulus fiskal melalui perubahan belanja atau pajak dapat mulai berdampak pada PDB riil dapat dirasakan.



Kebijakan Fiskal Di Indonesia



Peran APBN dalam Perekonomian



Masy. Adil, Makmur, Sejahtera

Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Perekonomian Indonesia

Alokasi

Distribusi

Stabilisasi

3 Fungsi Kebijakan Fiskal

1

Alokasi

Pengenaan Pajak, Subsidi, dan Regulasi, sangat berpengaruh pada *Supply Side*.

2

Stabilisasi

Mengatasi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi pada siklus ekonomi atau bisnis.

3

Distribusi

Dilakukan melalui pengenaan pajak dan pemberian subsidi



Anggaran Pemerintah (APBN)



INFORMASI

APBN 2019

APBN UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN
DAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA



APBN Merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-Undang No.12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019)

APBN memiliki dua tujuan:



Membiayai kegiatan
dan program
Pemerintah



Mencapai target
makro-ekonomi
Pemerintah

Esensi Kebijakan Fiskal:



Optimalisasi penggunaan APBN untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi seperti *full-employment*, *sustainable economic growth* dan *price level stability*.



Instrumen Fiskal yang Digunakan

A. Pendapatan Negara

- a. Penerimaan Pajak
 - *Tax rate*
 - *Non-Taxable Income* (PTKP)
 - Tambahan jenis pajak
 - Cukai
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. Penerimaan Hibah

B. Belanja Negara

- a. Belanja Pemerintah Pusat
 - Belanja K/L
 - Belanja Non-K/L
- b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

C. Pembiayaan Anggaran

- a. Pembiayaan Utang
 - SBN
 - Pinjaman Dalam Negeri dan LN
- b. Pembiayaan Investasi
 - Investasi kepada BUMN (PMN)
 - Investasi kepada BLU
- c. Pemberian Pinjaman
 - Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Lembaga/Badan lainnya
- d. Pembiayaan Lainnya
 - Saldo Anggaran Lebih (SAL)



Instrumen Fiskal untuk Membiayai Pembangunan



Pembangunan dibiayai melalui 3 instrumen utama penerimaan negara

Pajak



Kontribusi wajib setiap warga negara yang diatur oleh Undang-Undang. Hasil pajak tidak dinikmati langsung oleh pembayar pajak. Pajak dipungut dari tambahan penghasilan atau saat melakukan aktivitas ekonomi yang menambah nilai, misalnya jual beli atau mengolah barang.

Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)



Seluruh penerimaan Pemerintah yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, misalnya keuntungan Pemerintah mengelola tambang dan sektor migas, jasa atas layanan yang diberikan Pemerintah dan setoran deviden BUMN.

Hibah dan Pinjaman



Penerimaan negara yang berasal dari bantuan atau pinjaman dari negara atau penduduk negara lain serta warga negara sendiri.





Pajak sebagai Contoh Instrumen Fiskal



82%

Penerimaan Negara

Berasal Dari Penerimaan Perpajakan (APBN 2019)



PPH Pasal 21

Dipungut dari upah, gaji, honor & penghasilan yang diterima dari pemberi kerja



PPH Badan

Dipungut dari persentase keuntungan bersih yang diterima oleh badan usaha



PPH OP

Dipungut dari penghasilan atau keuntungan orang yang bekerja sendiri atau memiliki usaha



PPN Dlm Negeri

Dipungut dari aktivitas jual beli barang di dalam negeri



Pajak Atas Impor

Dipungut dari aktivitas memasukkan atau mengimpor barang dari luar negeri



Pajak sebagai Instrumen Fiskal: Tarif PTKP & Tarif Pajak



PTKP

(Penghasilan Tak Kena Pajak)

Merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, wajib pajak harus membayar PPh.

Contoh Besaran PTKP 2018

Status	Besaran PTKP
Tidak Kawin/0	54.000.000
Tidak Kawin/2	63.000.000
Kawin/0	58.500.000
Kawin/2	67.500.000
Kawin/I/0	108.000.000
Kawin/I/2	117.000.000



Tarif Pajak

Indonesia menerapkan tarif pajak progresif bagi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan kena pajak (PKP) s.d. 50 juta	Tarif Pajak 5%
PKP 50-250 juta	Tarif Pajak 15%
PKP 250-500 juta	Tarif Pajak 25%
PKP lebih besar dari 500 juta	Tarif Pajak 30%

Tarif Pajak Badan di Indonesia

Tarif PPh Badan Normal	Tarif Pajak sebesar 25%
Badan usaha dengan penghasilan usaha < 4,8 milyar (termasuk UMKM)	Tarif Pajak Final 0,5% dari omset/bulan
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Tarif Pajak 10%





Contoh Keb. Fiskal: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



PNBP merupakan penerimaan negara yang tidak berasal dari sektor perpajakan. Pada Bulan Juli Tahun 2018, revisi Undang-Undang PNBP telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah.



Keluarnya Undang-Undang PNBP menjadi bagian penting dari tujuan Pemerintah yang ingin mentertibkan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab serta mendorong perekonomian menjadi lebih mandiri.

6 Kluster Objek PNBP



Pemanfaatan SDA



Pengelolaan Danac



Bidang Pelayanan publik



Bidang Hak Negara Lainnya



Kekayaan Negara Dipisahkan



Pengelolaan BMN

Bentuk Tarif PNBP

Rp.

Tarif Spesifik, dalam bentuk nominal uang yang ditetapkan

%

Tarif Ad Valorem, dalam bentuk persentas dan formula yang ditetapkan



Performa APBN Indonesia di Tahun 2018



PENDAPATAN

1.942,3 102,5 % Of Budget
13,2 % Of GDP

PENERIMAAN PERPAJAKAN

1.521,4 94 % Of Budget
10,32 % Of GDP
13,2 % Growth

PNBP

407,1 147,8 % Of Budget
2,76 % Of GDP
30,8 % Growth

HIBAH

13,9 1.161,4 % Of Budget
0,09 % Of GDP
19,5 % Growth

2018 BUDGET

**In Rp. Trillion*

REALISATION



DEFICIT TO GDP

259,9 1,76%

PRIMARY BALANCE

- 4,7 % Of Budget
-1,8 trillion
-0,01 % Of GDP

BELANJA

2.202,2 99,2 % Of Budget
14,93 % Of GDP

BELANJA PEM. PUSAT

1.444,4 99,3 % Of Budget
9,79 % Of GDP
14,2 % Growth

TKDD

757,8 98,9 % Of Budget
5,13 % Of GDP
2,1 % Growth

PEMBIAYAAN NEGARA

300,48 92,2% Of Budget
2,03 % Of GDP
-18,1 % Growth

2018

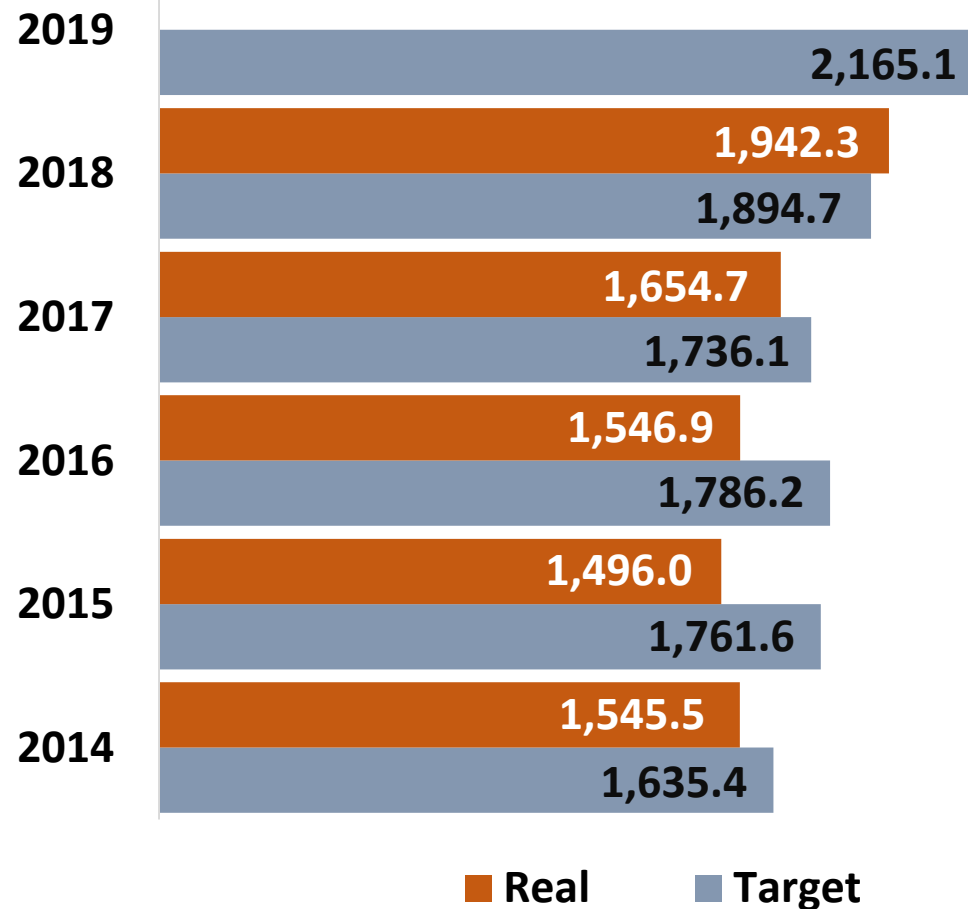


Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2018

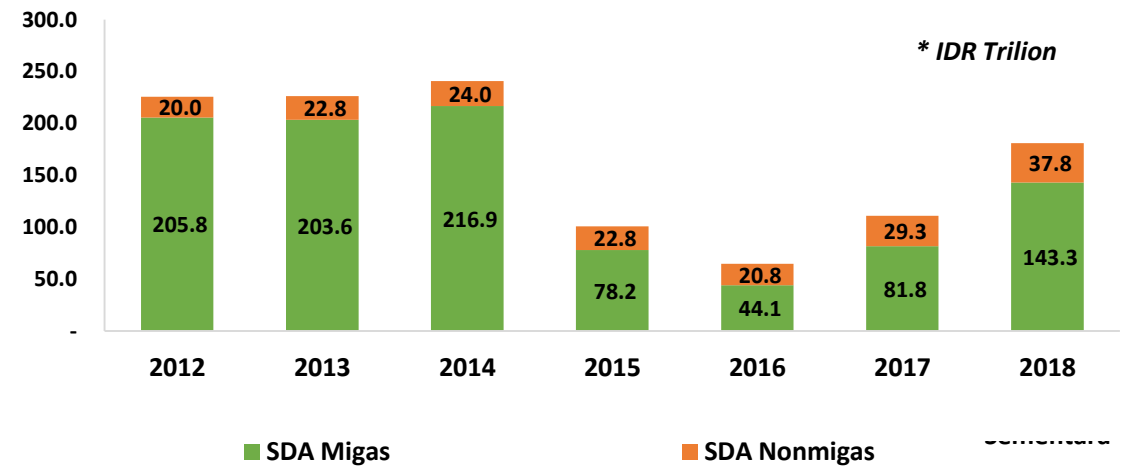


Pendapatan Negara Semakin Membaik, PNBP Meningkatkan Tajam, Kinerja BLU Meningkat

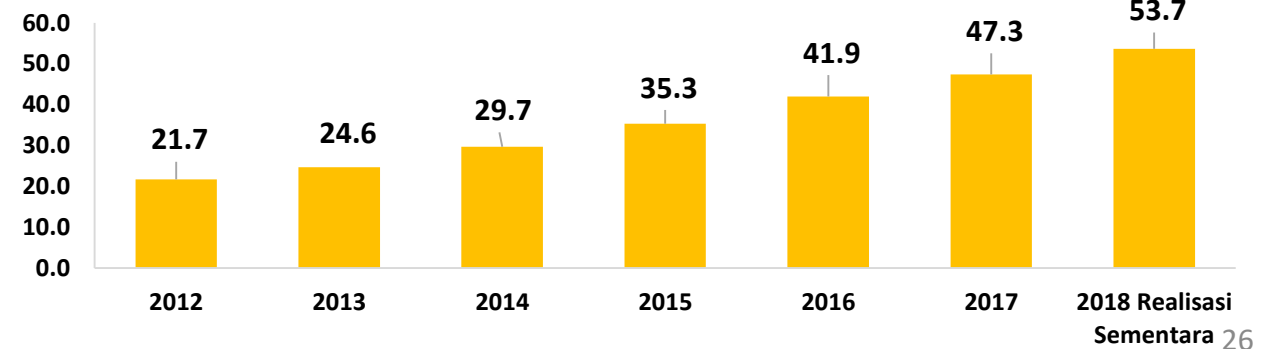
Kinerja Pendapatan Negara 2014-2018



Kinerja PNBP SDA 2012-2018



Kinerja BLU 2012-2018

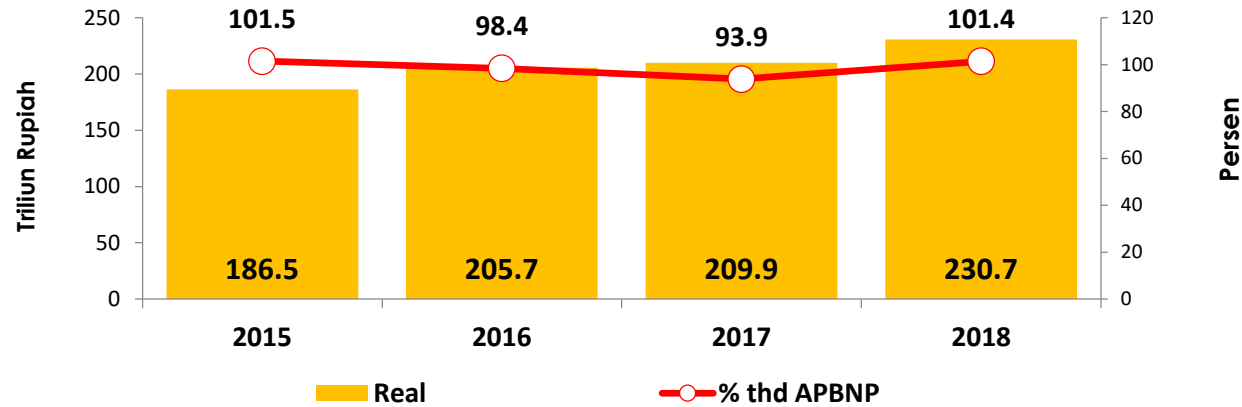




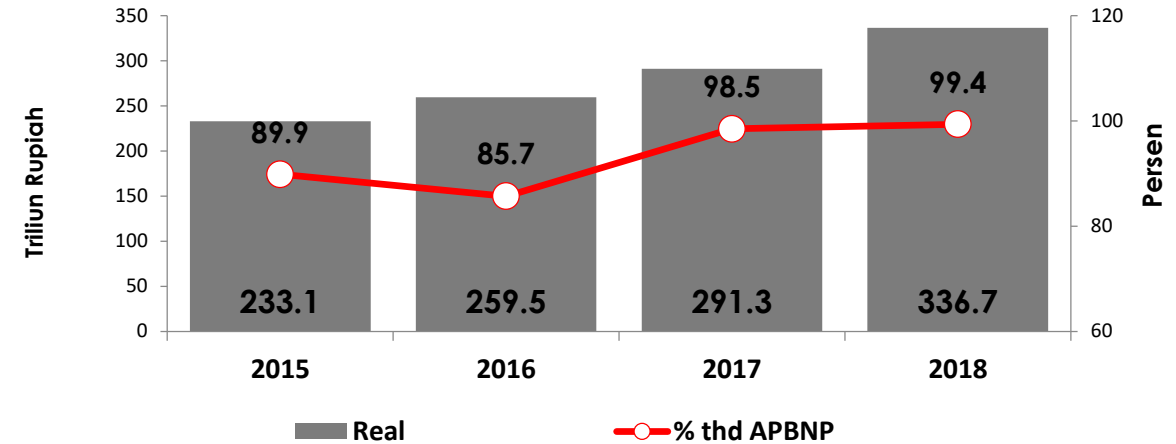
Kinerja Belanja Negara Tahun 2018



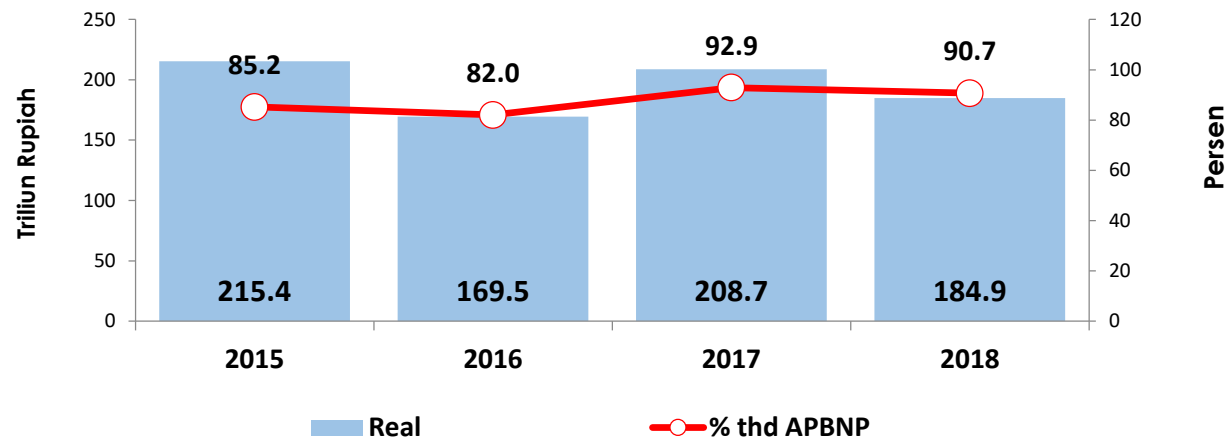
Belanja Pegawai 2015-2018



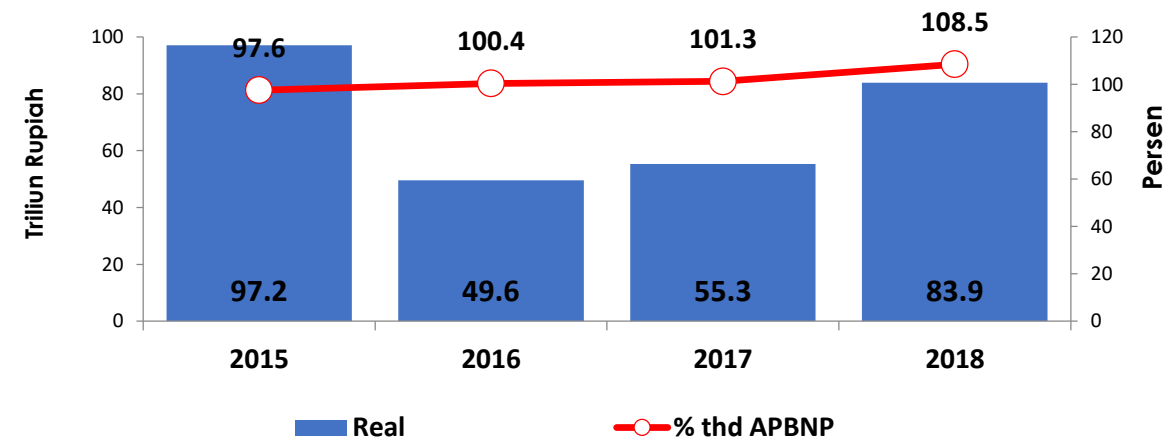
Belanja Barang 2015-2018



Belanja Modal 2015-2018



Bantuan Sosial 2015-2018

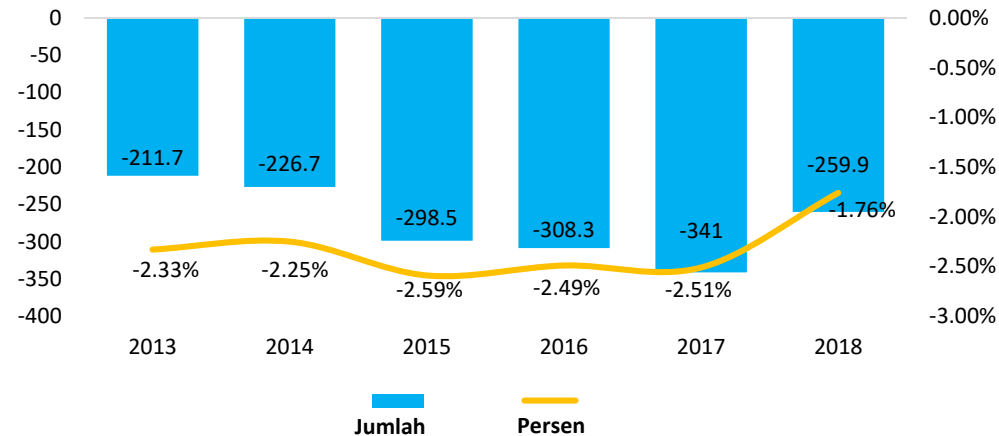




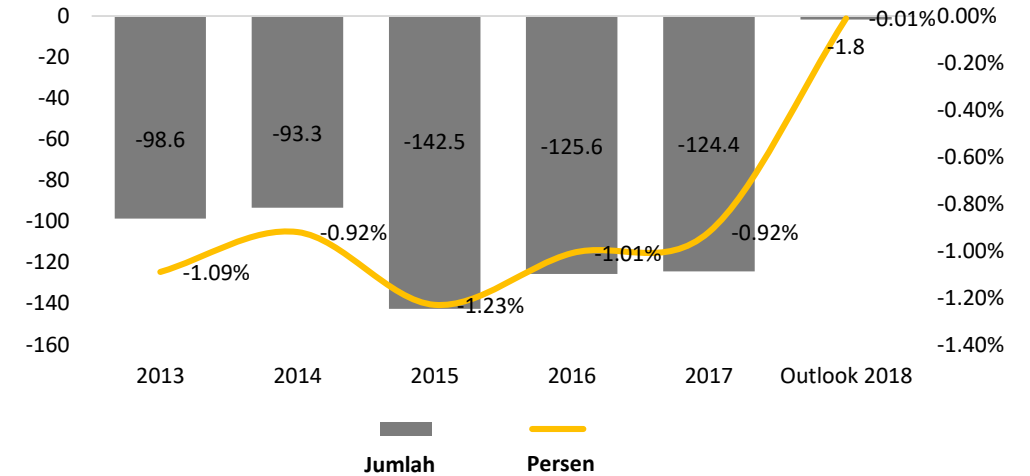
Kondisi Defisit dan Kinerja Pembiayaan Tahun 2018



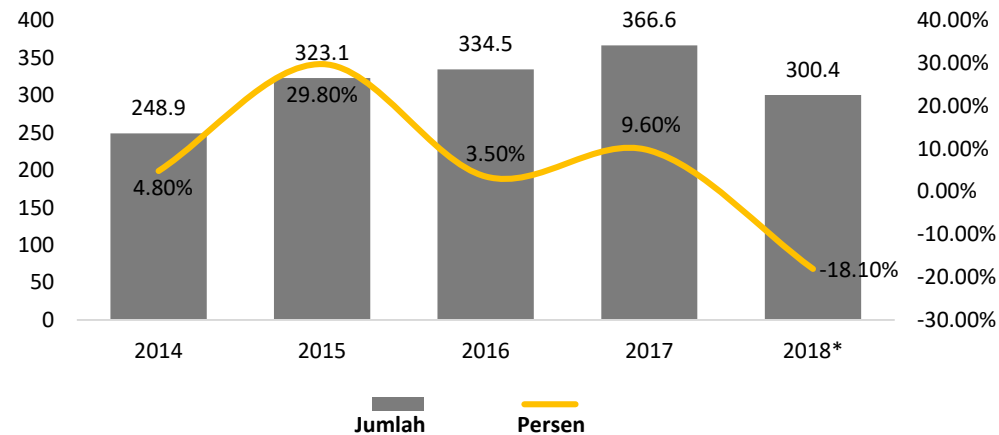
Defisit Anggaran 2013-2018



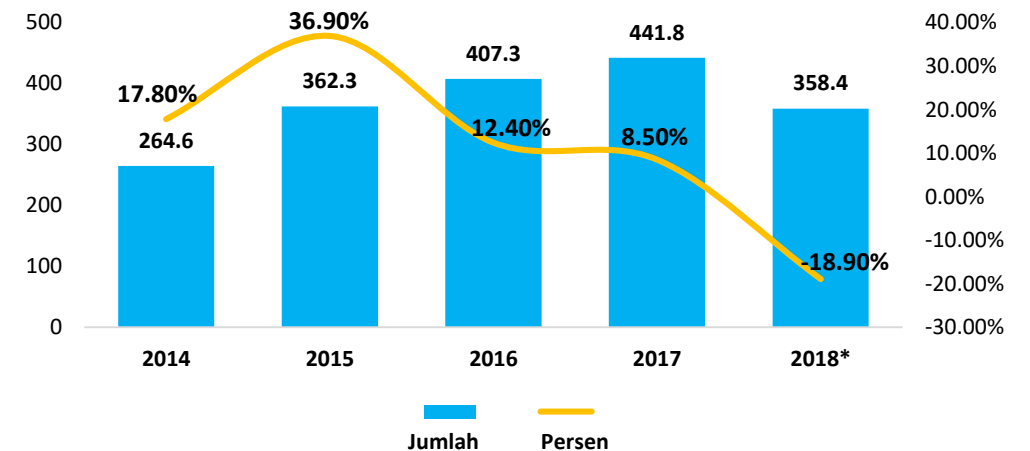
Kesimbangan Primer 2013-2018



Pembiayaan Anggaran



Pembiayaan Melalui SBN





Asumsi Makroekonomi dan Target Pembangunan 2019



Asumsi Makroekonomi

5.3%		Pertumbuhan PDB
3.5%		Inflasi
5.3%		3 month T-Bills
15,000		Exchange Rate (Rp/ USD)
70		ICP (USD/ barrel)
775		Oil Lifting (barrel/ day)
1,250		Gas Lifting (barrel/ day)



Target Pembangunan

4.8% - 5.2%		Pengangguran
8.5% - 9.5%		Kemiskinan
0.38 - 0.39		Gini Ratio
71.98		HDI



APBN Indonesia Tahun 2019



PENDAPATAN
2.165,1 (14,38 % of GDP)*
Realisasi **537,7** (24,84%
of APBN 2019)

PENDAPATAN PAJAK
1.786,4 (11,86 % of GDP)*
Realisasi **438,3** (24,54%
of APBN 2019)

PNBP
378.3 (2,51 % of GDP)*
Realisasi **99,4** (26,29%
of APBN 2019)

HIBAH
0,4 (0,002 % of GDP)*
Realisasi **0,38** (89,25%
of APBN 2019)

2019 BUDGET (Trillion Rp)

* % of GDP Estimation

** Realisasi Per 7 Mei 2019

DEFICIT TO GDP

1,84%

PRIMARY BALANCE

(20,1)
(-0.13 % of GDP)*

BELANJA
2.461,1 (16,34 % of GDP)*
Realisasi **651,3** (26,46%
of APBN 2019)

BELANJA PEM. PUSAT
1.634,3 (10,85 % of GDP)*
Realisasi **388,9** (23,8%
of APBN 2019)

TKDD & DANA DESA
826,8 (5,49 % of GDP)*
Realisasi **262,3** (31,73%
of APBN 2019)

PEMBIAYAAN UTANG
359,4 (2,38 % of GDP)*
Realisasi **145,8** (40,58%
of APBN 2019)

PEMBIAYAAN INVESTASI
(75,9) (-0,5 % of GDP)*
Realisasi **(2,5)** (3,29%
of APBN 2019)

2019



Kinerja APBN 2019 Hingga Akhir Maret 2019

APBN (triliun Rupiah)	2018			2019				
	Realisasi s.d. 31 Maret	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Maret		% thd APBN	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	333.7	17.6	12.7	2,165.1	350.1	▲	16.2	▲ 4.9
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	333.5	17.6	12.6	2,164.7	350.0	▲	16.2	▲ 5.0
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	262.4	16.2	10.3	1,786.4	279.9	▲	15.7	▲ 6.7
a. PENDAPATAN DJP (include PPh migas)	244.5	17.2	9.9	1,577.6	249.0	▲	15.8	▲ 1.8
B. PENDAPATAN DJBC	17.9	9.2	15.9	208.8	31.0	▲	14.8	▼ 73.0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	71.0	25.8	22.1	378.3	70.0	▼	18.5	▼ (1.4)
II. PENERIMAAN HIBAH	0.3	21.8	76.1	0.4	0.1	▼	25.9	▼ (56.8)
B. BELANJA NEGARA	419.6	18.9	4.9	2,461.1	452.1	▲	18.4	▲ 7.7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	234.0	16.1	14.2	1,634.3	260.7	▲	16.0	▲ 11.4
1. Belanja K/L	103.1	12.2	11.6	855.4	128.8	▲	15.1	▲ 24.8
2. Belanja Non K/L	130.8	21.5	16.3	778.9	132.0	▲	16.9	▲ 0.9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	185.6	24.2	(4.9)	826.8	191.3	▲	23.1	▲ 3.1
1. Transfer ke Daerah	175.3	24.8	(10.2)	756.8	181.2	▲	23.9	▲ 3.4
2. Dana Desa	10.3	17.1	-	70.0	10.1	▼	14.4	▲ (1.9)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(17.4)	19.9	(55.1)	(20.1)	(31.4)	▼	156.0	▲ 80.7
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(85.8)	26.3	(17.3)	(296.0)	(102.0)	▼	34.4	▲ 18.8
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(0.58)			(1.84)	(0.63)	▼		
E. PEMBIAYAAN	152.2	46.7	(19.7)	296.0	177.4	▲	59.9	▲ 16.6
al. I. PEMBIAYAAN UTANG	150.6	37.7	(19.9)	259.3	177.9	▲	49.5	▲ 18.1
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	66.3				75.5	▲		



Medium-Term Fiscal Framework (MTEF)



Fokus pada belanja yang produktif dan berkualitas, meningkatkan sustainabilitas dan memperluas ruang fiskal

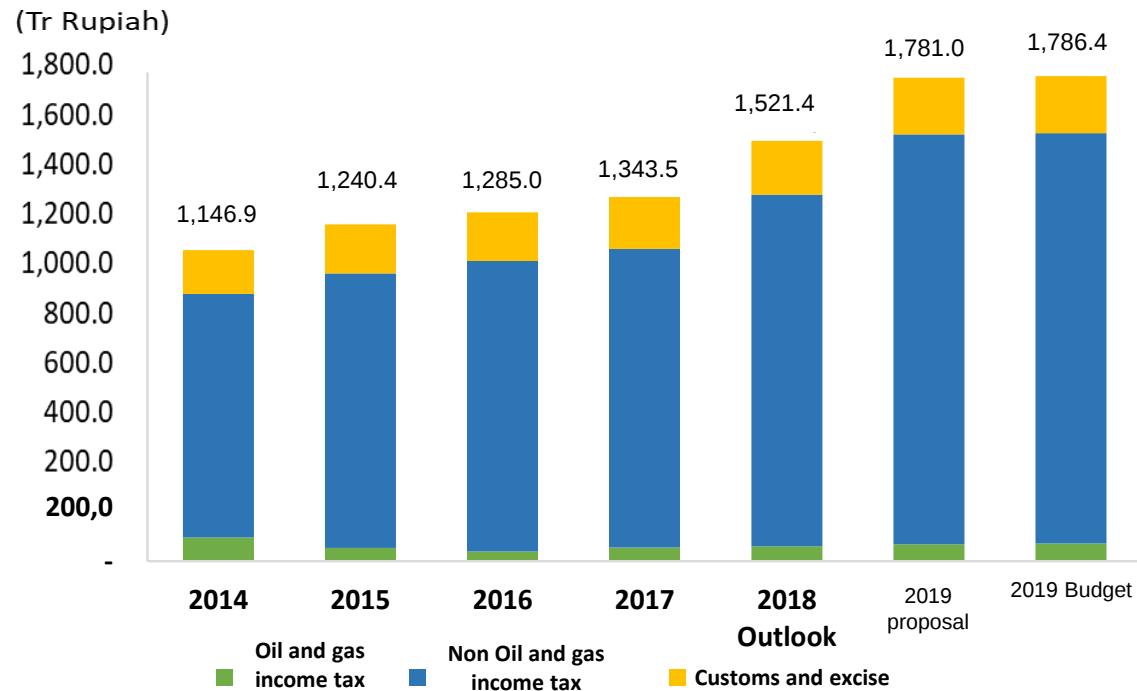
Items (% of GDP)	Preliminary Realisation 2018	APBN 2019	2020	2021	2022
Pendapatan dan Hibah	13.2	13.4	12.7 – 13.9	13.5 – 14.0	13.6 – 14.4
Tax Ratio*	11.5	12.2	11.4 – 12.5	11.6 – 13.0	11.8 – 13.6
Total Belanja	14.9	15.3	14.3 – 15.6	15.0 – 15.7	15.1 – 16.0
Capital Expenditure	1.3	1.3	1.8 – 2.3	2.2 – 2.7	2.3 – 3.0
Primary Balance	(0.01)	(0.12)	0.05 – 0.1	0.10 – 0.01	0.1 – 0.05
Budget Deficit	(1.76)	(1.84)	(1.6) - (1.7)	(1.5) - (1.7)	(1.5) - (1.6)
Rasio Utang	30.0	30.0	28.5 - 28.6	27.8 – 28.3	26.3 – 27.9
• Strengthening quality of spending by increasing productive avenues • Enlarging fiscal space through revenue increase • Efficiencies in non-priority spending • Developing creative and innovative financing • Manageable deficit and debt level • Positive primary balance in 2020					



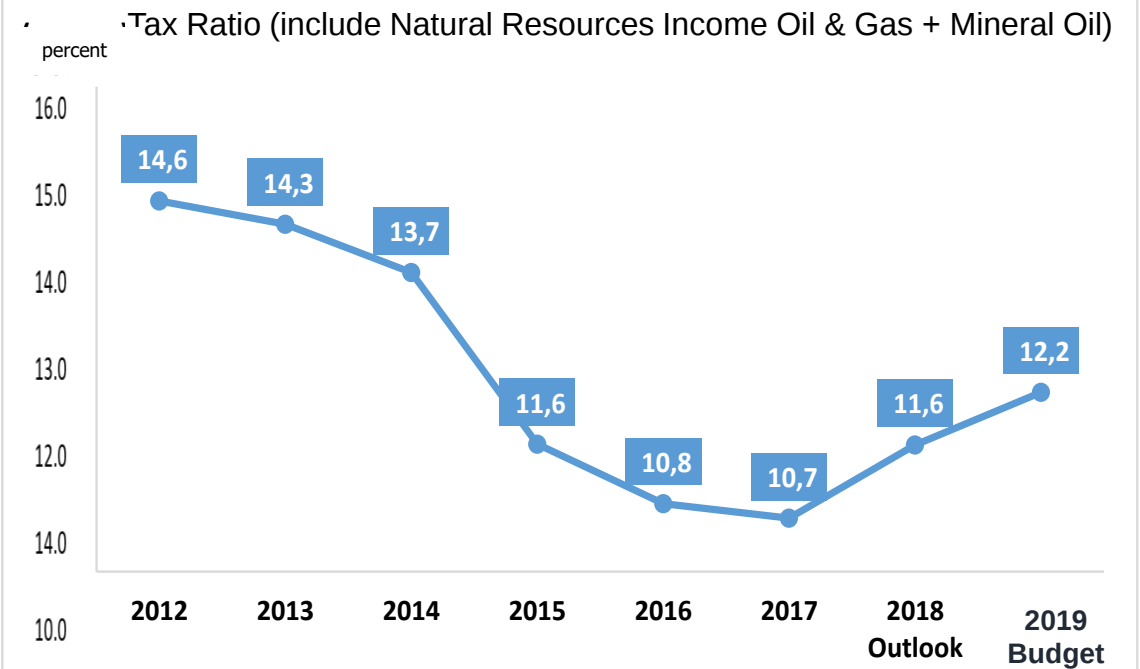
Target Penerimaan Pajak 2019 Cukup Realistis



Pertumbuhan Pajak 2 Tahun terakhir Lebih Tinggi Dari Rata-Rata (2018-2017 tumbuh 11,1%)



Tax Ratio Terus Membaik 12,2% in 2019



- Kontribusi penerimaan pajak pada total pendapatan negara meningkat dari 74% di tahun 2014 mencapai 82,5% di tahun 2019
- Insentif fiskal seperti: *tax holiday*, *tax allowance* diterbitkan untuk menjaga keberlanjutan iklim investasi dan peningkatan daya saing



Fokus Belanja 2019: Fokus Pada SDM dan Infrastruktur



Education Rp492.5 T



Kartu Indonesia Pintar
20.1 juta Pelajar

Beasiswa
471,800 Pelajar

Pendidikan Vokasi

**Infrastruktur
Pendidikan**

Infrastructure Rp415.0 T



Jalan
1,834.7 km

Irigasi
170,400 Ha

Rasio Elektrifikasi
99.9 %

Bendungan
48 units

Rel KA
394.8 km

Apartemen
9,003 units

Social Protection Rp385.2 T



**Program Keluarga
Harapan**
10 juta keluarga

**Non-cash Transfer
(BNPT)**
15.6 juta keluarga

Subsidi Bunga
Pembiayaan UMKM
Perumahan

Health Rp123.1 T



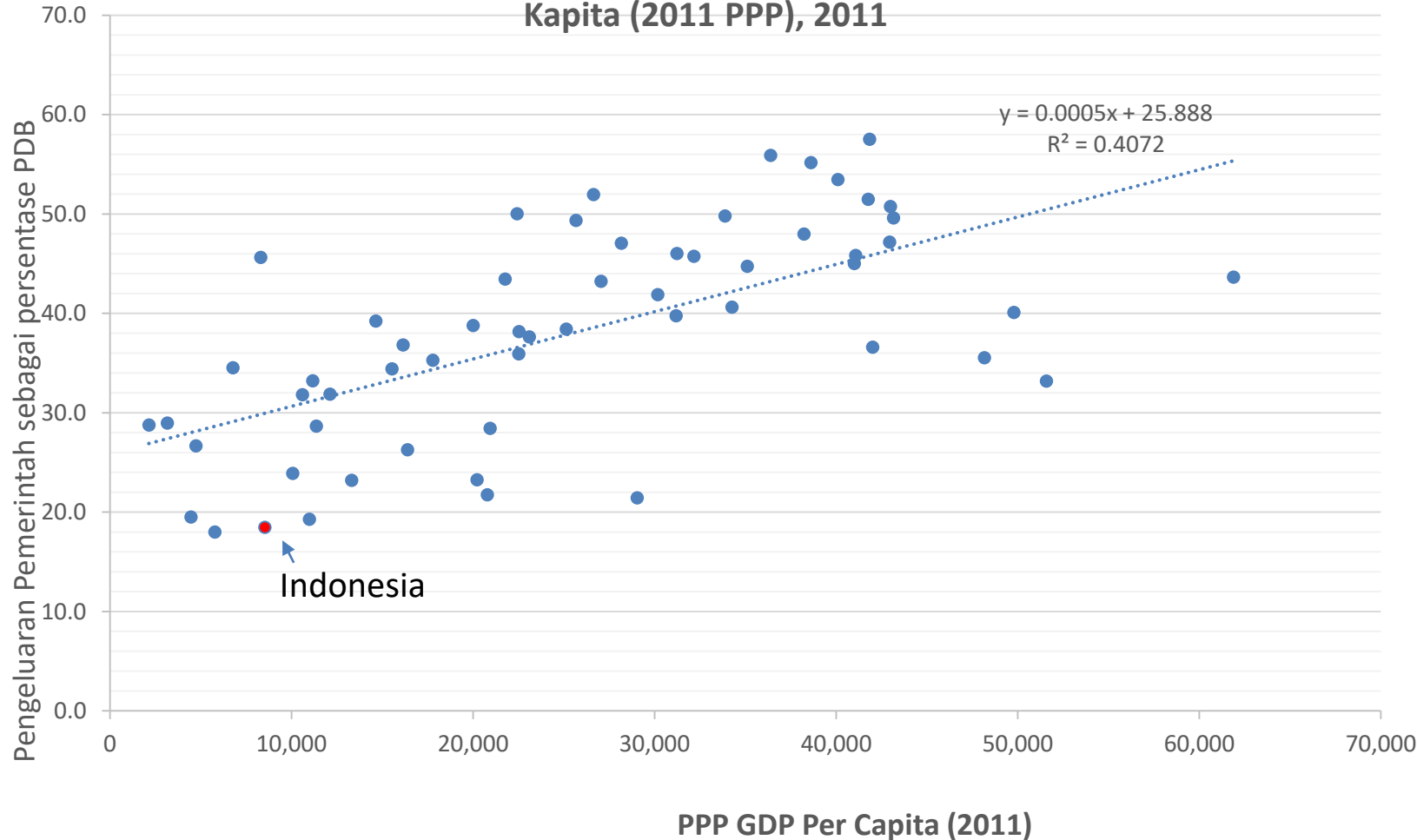
**Health Coverage
(PBI JKN)**
96.8 Juta orang



Tantangan Implementasi Kebijakan Fiskal di Indonesia



Gambar 1: Pengeluaran Pemerintah sebagai Persentase terhadap GDP Per Kapita (2011 PPP), 2011



- Kebutuhan pengeluaran pemerintah lebih besar dari praktek yang berlaku sekarang

- Pengeluaran pemerintah Indonesia lebih kecil dibandingkan negara dengan pendapatan perkapita sama



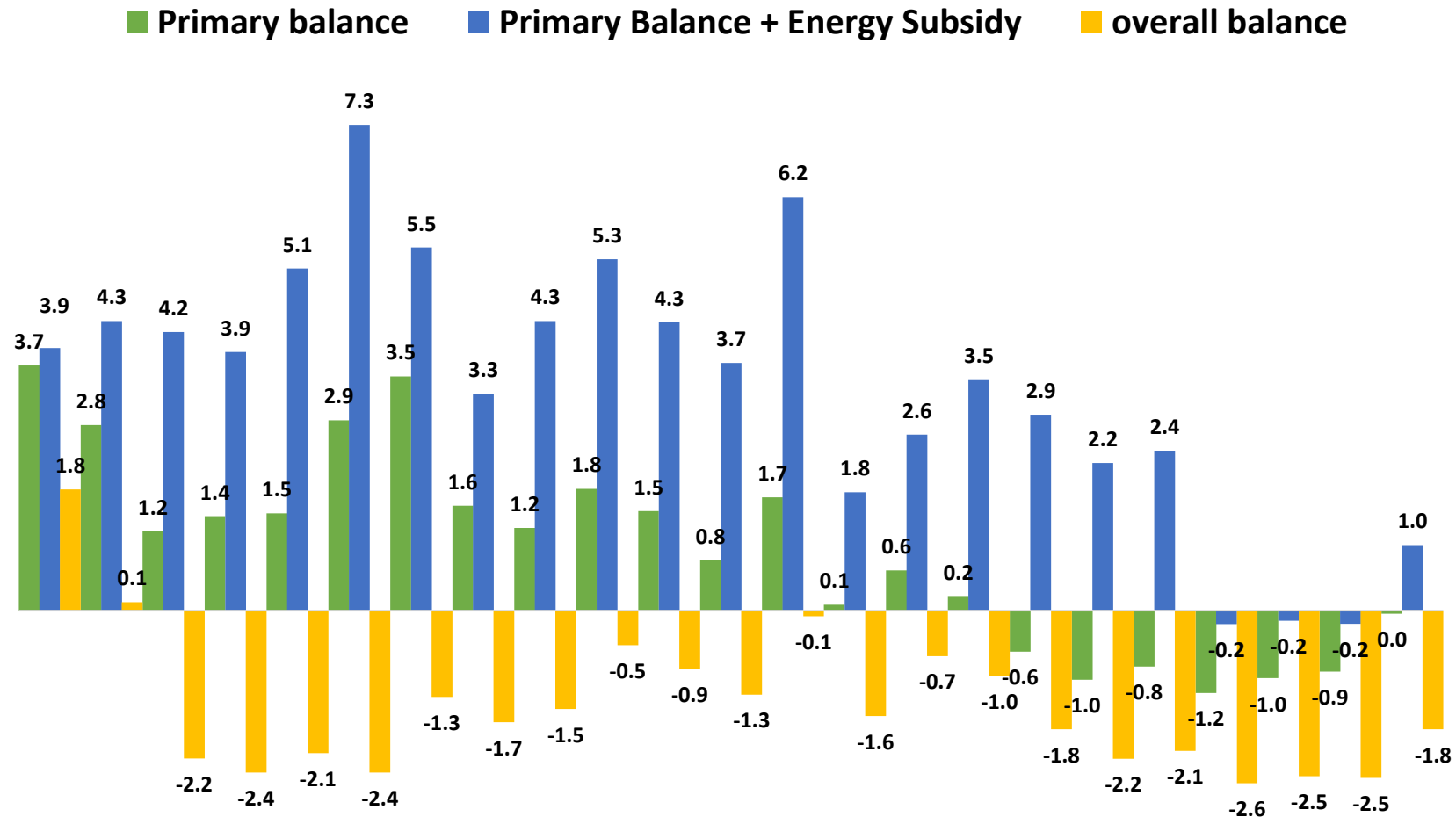
Ruang Fiskal (Fiscal Space) harus lebih besar



Untuk memperkuat ketahanan (resilience) ekonomi Indonesia

- **Krisis Ekonomi dapat berulang setiap saat.**
 - ✓ Pengalaman AFC 1998 dan GFC 2008, ketahanan ekonomi tergantung pada kesiapan suatu negara menghadapi krisis.
 - ✓ *Fiscal Spaces* sudah banyak digunakan untuk mendukung perekonomian selama periode post AFC 1998 dan GFC 2008
- **Masih ada *contingent liability* yang akan bisa menjadi beban fiskal pemerintah.**
 - ✓ Sistem Jaminan Sosial
 - ✓ Pemilikan pemerintah BUMN
 - ✓ UU Bank Indonesia
 - ✓ Jaminan terhadap Simpanan Masyarakat
- **Ruang Fiskal harus disediakan untuk membiayai krisis yang dapat terjadi setiap saat**

Indonesia: Primary Balance, 1996-2018 (% of GDP)



1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



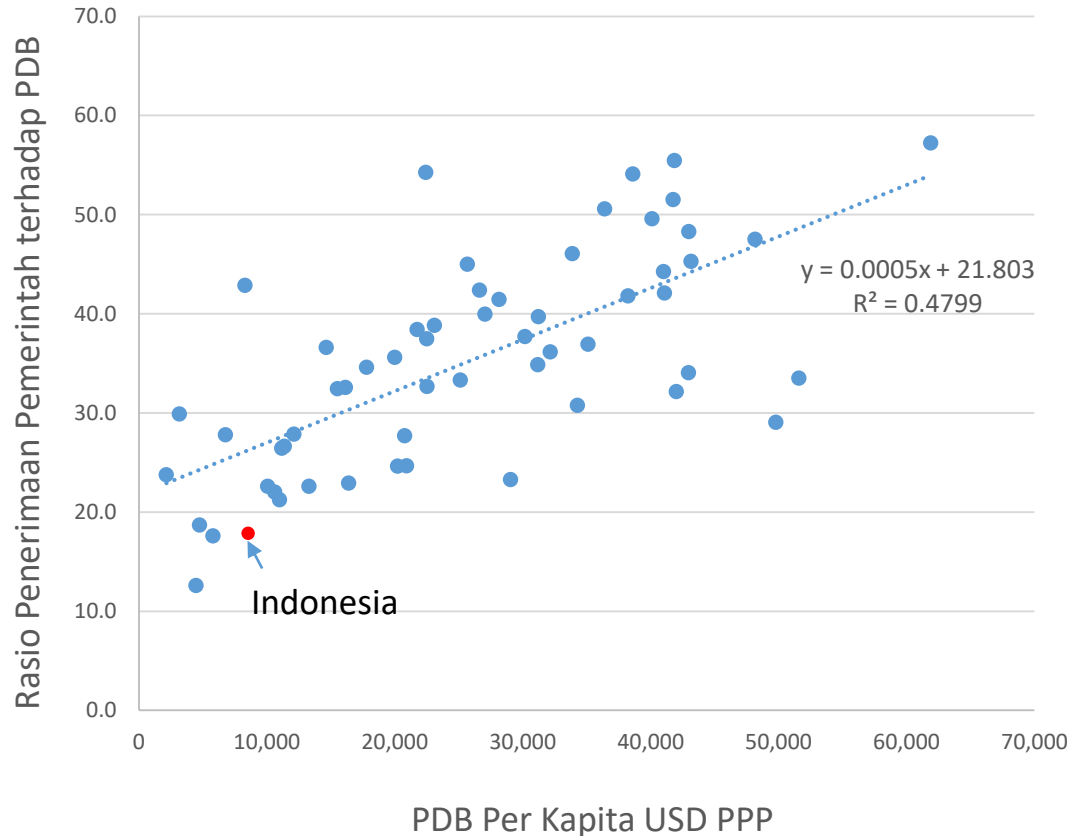
Tantangan Implementasi Kebijakan Fiskal di Indonesia



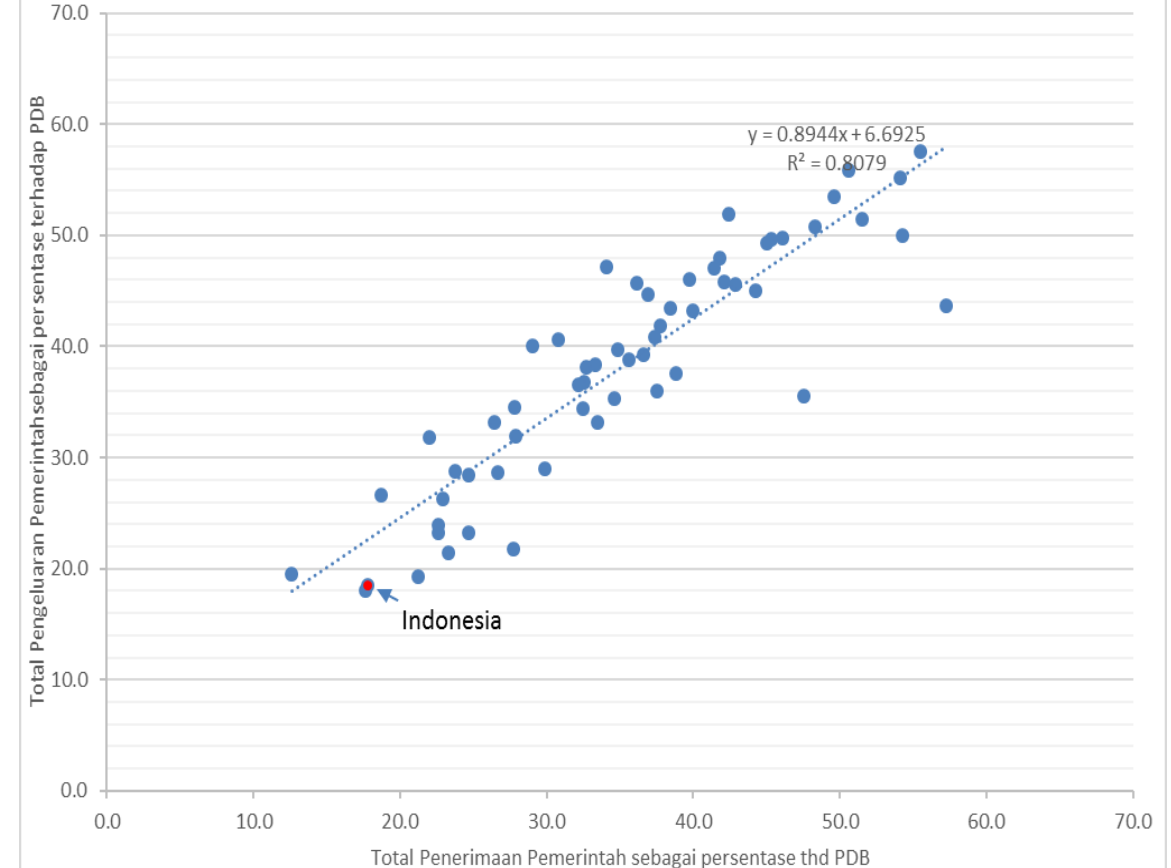
- Pengeluaran yang rendah tersebut disebabkan karena *revenue (tax base)* yang rendah pula



Rasio Penerimaan Pemerintah terhadap PDB dan PDB per Kapita USD PPP, 2011



Hubungan antara Penerimaan Pemerintah dan Pengeluaran Pemerintah





Tantangan Implementasi Kebijakan Fiskal di Indonesia



- Alokasi APBN belum sepenuhnya mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.



- APBN masih belum sepenuhnya bersifat *counter-cyclical*.



Tantangan implementasi kebijakan fiskal di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa perlunya dilakukan **reformasi fiskal**.



Reformasi Kebijakan Fiskal: Empat Pilar Kebijakan



- 1. Menggenjot rasio penerimaan negara terhadap PDB melalui:**
 - Peningkatan penerimaan pajak non migas
 - Optimalisasi penerimaan bukan pajak baik penerimaan sumber daya alam maupun non sumber daya alam.
- 2. Perbaiki alokasi pengeluaran pemerintah**
- 3. Efisiensi belanja negara:**
 - Efisiensi belanja pemerintah pusat
 - Perbaiki mekanisme transfer belanja ke daerah dan dana desa.
- 4. Manajemen Utang Pemerintah**



Track 1: Tax Reform

1. Perluasan Basis Pajak

- Pembayar pajak di Indonesia jauh dari harapan
- Pelajaran dari Tax Amnesty 2016-2017:
 - kontributor pembayar tax amnesty adalah pembayar pajak yang telah berkontribusi. Artinya pembayar pajak yang tergolong “patuh” pun tidak membayar pajak seperti yang seharusnya.
 - Pembayar pajak baru masih minimal. Masih banyak penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak tetapi tidak patuh dan tidak membayar pajak.

2. Perbaikan tax administration

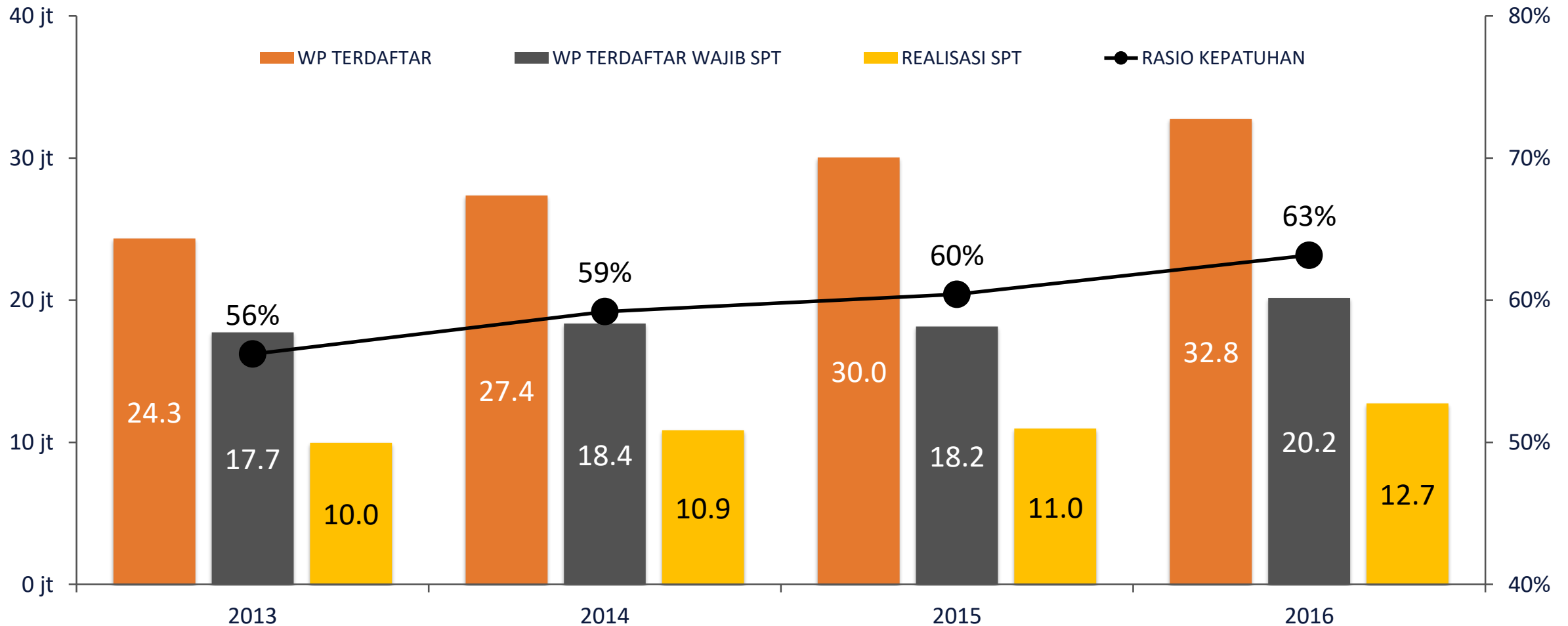
- Sistem IT yang ada jauh dari memadai. Perlu perbaikan secara menyeluruh untuk memperbaiki *tax payer's confidence* dan integritas sistem perpajakan



Kepatuhan Pajak Masih Rendah: Jumlah Pegawai Pajak Masih Terbatas



Pembayar pajak di Indonesia jauh dari harapan



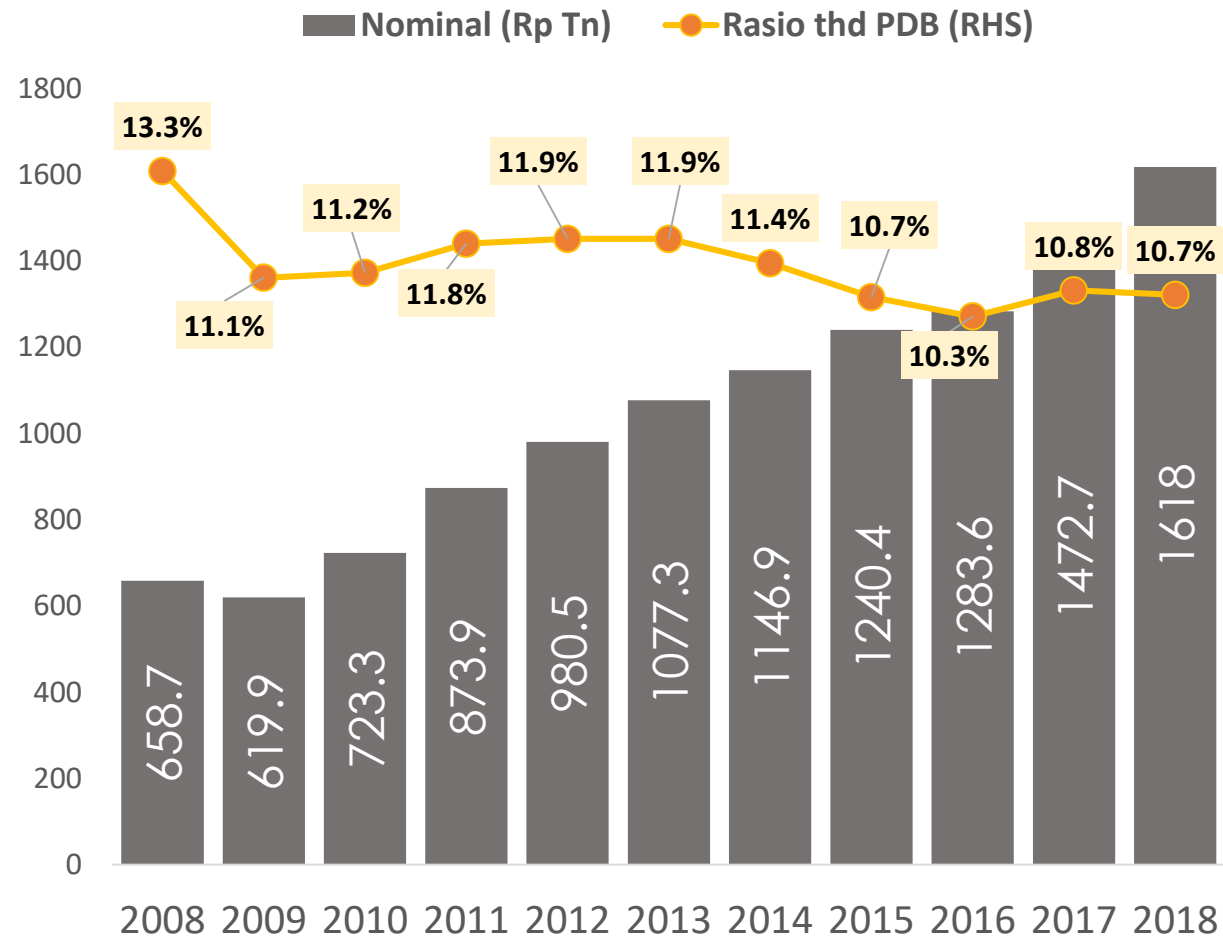
Jumlah Pegawai DJP : 39.980 orang



Berujung pada Tax Ratio yang Rendah

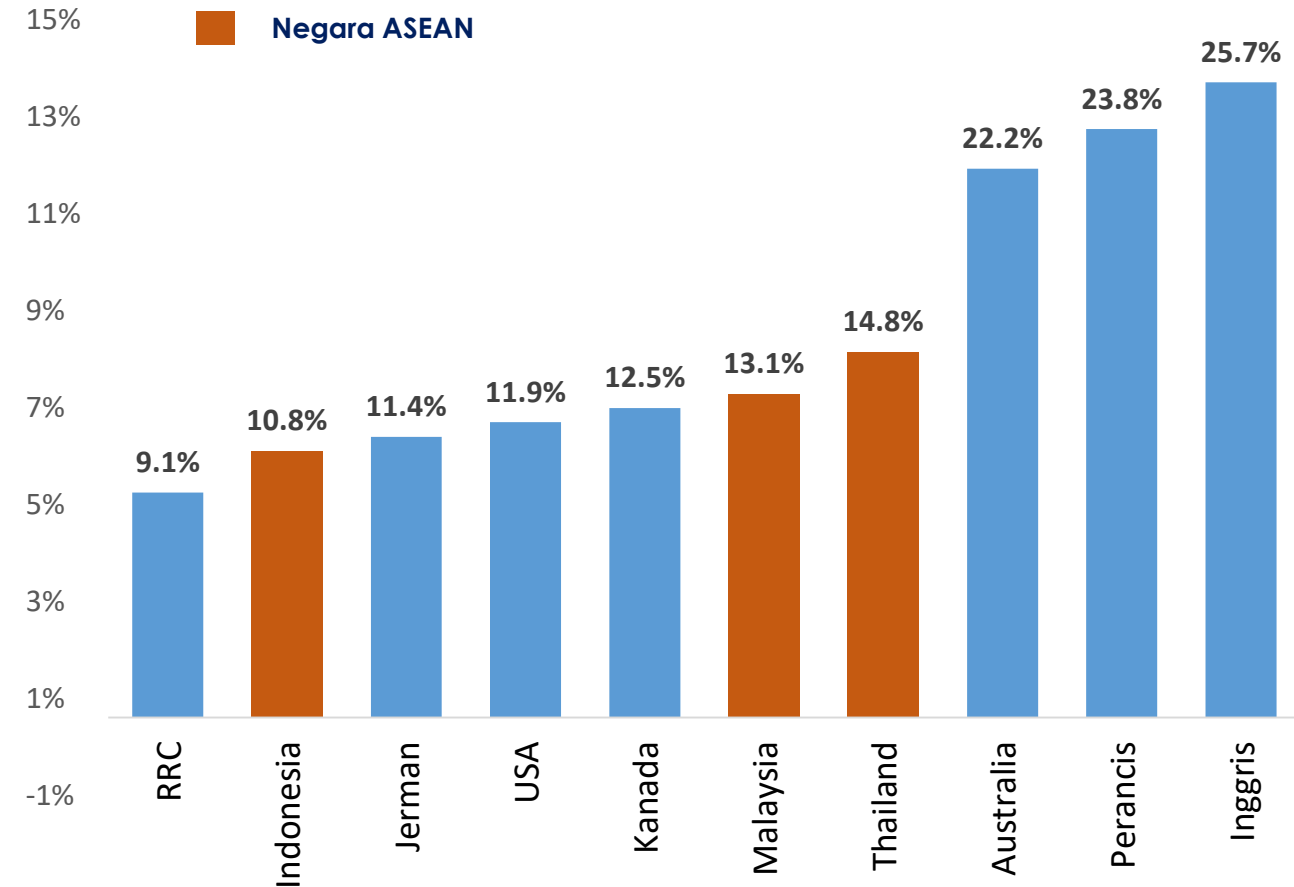


Penerimaan Perpajakan



Sumber: Kemenkeu

Perbandingan Tax Ratio (%)



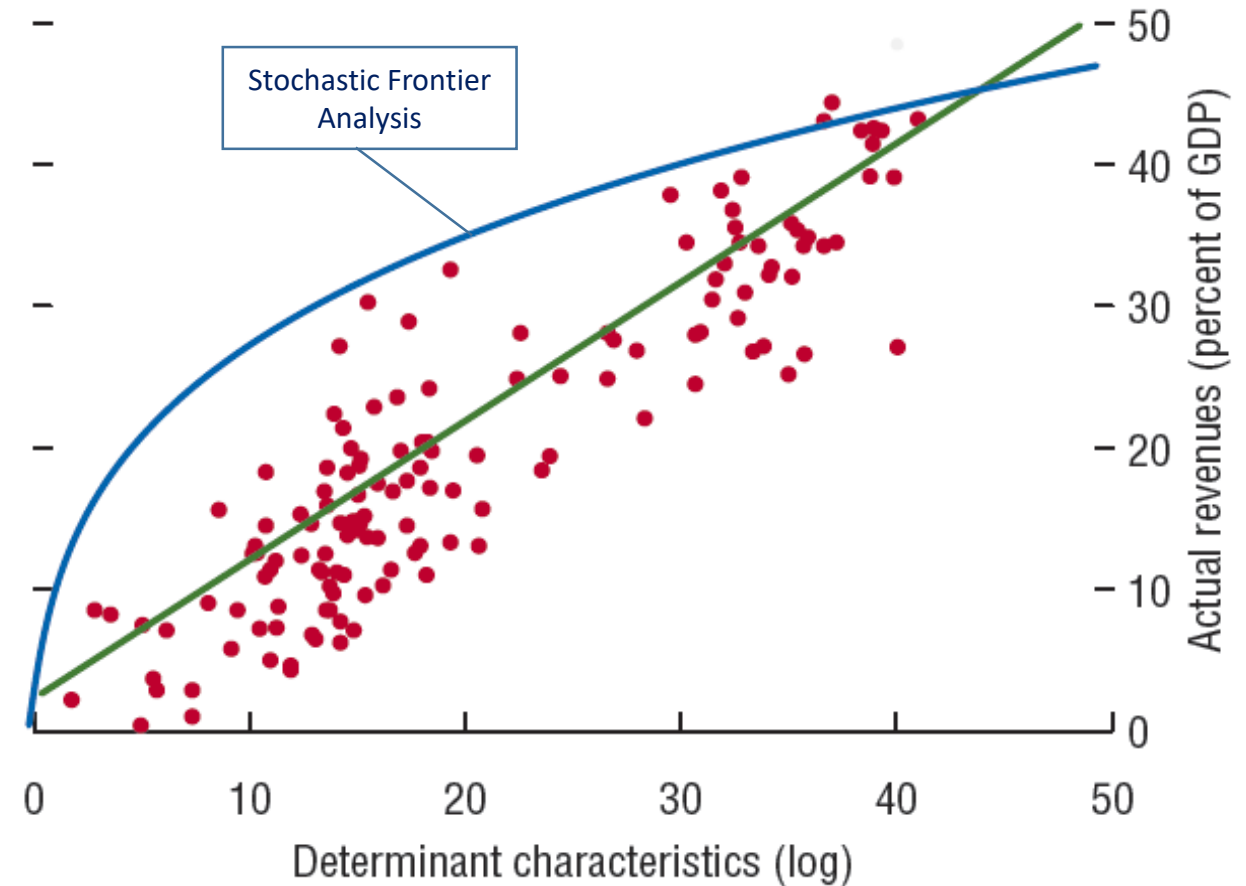
Sumber: IMF, 2017



Potensi untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak dalam Jangka Menengah



- IMF (2013)¹ estimated Indonesia's tax effort between 0.42-0.47 in 2011
- IMF (2013)² also estimated Indonesia's total revenue gaps of 5.0% of GDP
- IMF (2011, 2014)³ and Sugana-Hidayat (2013)⁴ estimated VAT gaps between 47-60% of the current revenue



¹ Fenochietto, R and Pessino, C, "Understanding Countries' Tax Effort, Working Paper 13/244, IMF, November 2013

² ____, "Taxing Times", Fiscal Monitor, World Economic and Financial Surveys, IMF, October 2013

³ FAD, "Revenue Mobilization in Developing Countries", IMF, March 2011; IMF Mission, "Tax Policy and Administration: Setting the Strategy for the Coming Years", Fiscal Affairs Department, IMF, December 2014

⁴ Sugana, R and Hidayat A, "Analysis of VAT Revenue Potential and Gaps in Indonesia 2013", Journal of Indonesian Economy and Development, University of Indonesia, July 2014.



Tujuan Reformasi Pajak



- **Peningkatan penerimaan pajak per PDB** dengan menutup “*compliance gap*”.
- **Perbaikan iklim investasi** dengan mengurangi biaya *tax compliance* dari wajib pajak.
- **Efisiensi *Tax Administration*** dengan meminimalkan biaya pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan
- Membangun *public trust and confidence* terhadap integritas sistem perpajakan.



Prinsip-Prinsip Reformasi Pajak



- **Simplicity:** tax system and tax administration should be easy to comply
- **Predictability:** tax law and regulation should be clear, accessible and consistently applied.
- **Effectiveness:** Tax Payer services and enforcement programs should be tailored to the specific characteristic of large, medium and small tax payers.
- **Integrity:** zero tolerance for corruption
- **Performance:** There should be incentives for high performance and accountability for result.
- **Transparency:** Actions taken by tax administration should be subject to scrutiny and results widely publicized
- **Efficiency :** paper-based should be minimized through investment in modern technology.
- **Quality :** problems should be identified and resolved before they become disputes
- **Fairness:** Dispute resolution should be fast, lost cost and imparzial
- **Professionalism :** Tax officer should be competent and highly motivated.



- **Tax administration reform** harus menjadi fokus dan *initial step* dari reformasi pajak.
- **Tax policy reform** seperti penyederhanaan atau penurunan tarif pajak akan menjadi prioritas kedua setelah *tax administration reform* dilakukan.
- Tanpa perbaikan *tax administration reform*, *tax policy reform* seperti pengurangan PPh korporasi akan menyulitkan pemenuhan tujuan peningkatan penerimaan pemerintah.



Arah Reformasi Perpajakan

KONDISI SEKARANG

- Institusi perpajakan perlu pembenahan: organisasi dan SDM; sistem informasi, basis data, dan proses bisnis; dan regulasi.
- Sinergi antar lembaga perlu dioptimalkan.
- Kepatuhan WP rendah.
- TAX RATIO = 11%

PILAR REFORMASI

Organisasi



Sumber Daya Manusia



Teknologi Informasi dan Basis Data



Proses Bisnis



Peraturan Undang-Undang



KONDISI DIHARAPKAN

- Institusi perpajakan yg kuat, kredibel, akuntabel dengan proses bisnis yg efektif dan efisien untuk optimalisasi penerimaan negara.
- Sinergi antar lembaga optimal
- Kepatuhan WP yang tinggi
- TAX RATIO = 14-16%

Pihak Eksternal Yg Terlibat

- 1) Tim *Observer* yang bertugas melakukan pengamatan, memberikan masukan dan pandangan sesuai dengan latar belakang dan pengalaman dalam bidang yang dikuasainya (Perwakilan Organisasi Internasional, Perwakilan Pelaku Usaha, Perwakilan Awak Media).
- 2) Tim *Advisor* yang bertugas memberikan masukan dan pandangan berdasarkan pengalaman, teori, dan keilmuan (Praktisi Perpajakan).



From the Theory to Actions: Inisiatif Reformasi Perpajakan



Jangka Pendek

- Peningkatan Mutu Pelayanan
- Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Memperkuat Kerjasama dengan Para Pihak
- Memberikan Kesempatan Wajib Pajak Memperoleh Keadilan Perpajakan
- Penguatan Institusi Perpajakan
- Penguatan Regulasi Perpajakan
- Penyiapan Regulasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

Jangka Panjang

- Meningkatkan Kewibawaan Institusi dan Kepercayaan Wajib Pajak kepada Institusi Perpajakan
 - ✓ Institusi yang Kuat
 - ✓ Institusi yang Kredibel
 - ✓ Institusi yang Akuntabel
- Melakukan Penataan Ulang Institusi Perpajakan
 - ✓ Penataan Ulang Organisasi
 - ✓ Penataan Ulang SDM
 - ✓ Penataan Ulang Proses Bisnis
 - ✓ Penataan Ulang Regulasi Perpajakan
 - ✓ Pengadaan *Core Tax System*



Track 2: Efisiensi Belanja Pemerintah



- **Belanja K/L** masih belum efisien dan efektif – belum sepenuhnya mengikuti *performance-based oriented*.
 - ✓ Belanja Pendidikan yang meningkat secara dramatis sejak tahun 2006 belum mempunyai dampak yang memadai terhadap perbaikan *outcomes*.
- **Transfer ke daerah** yang meningkat secara dramatis sejak tahun 2000 belum menghasilkan dampak yang seperti yang dijanjikan.
 - ✓ Dampak desentralisasi terhadap perbaikan jasa publik memang tidak memburuk tetapi masih dibawah *potential frontier*.
 - ✓ Begitu pula dengan dampak *fiscal equalization* walaupun sudah lebih baik, tetapi belum optimal hasilnya.
- **Transfer dana desa**: masih mencari bentuk yang tepat.



Tantangan-Tantangan untuk Melakukan Reformasi Fiskal



1. *Fiscal reform is **political action**.* Meyakinkan politisi untuk melakukan reformasi tidak mudah.
 - *Vested interests* di semua *level* baik dalam birokrasi maupun *executive* dan *legislative branches*.
 - ✓ Praktek ini terjadi di seluruh dunia.
 - Tantangan – *sometimes you have to accept the second best solution, you even end up with least worst option.*
2. *Fragmented **decision making and implementations***
 - Khususnya untuk sisi belanja – sebagian besar implementasi pengeluaran pemerintah (APBN) dilakukan di tingkat daerah dan desa (TKDD yang besar).
3. *Fiscal policy in theory is easier than the real actions. It requires understanding of political economy, vested interest, institutional challenges, governance, capacities and leadership.*



Tantangan dalam Pengelolaan APBN



Penerimaan **Proyeksi & Estimasi**

Membuat estimasi penerimaan yang **akurat dan kredibel**

Peningkatan kapasitas mengumpulkan penerimaan negara

Rasio penerimaan perpajakan masih **rendah**



Belanja **Komitmen**

Membuat keputusan belanja yang **strategis**

Memprioritaskan **belanja produktif** dan **mendukung pembangunan**

Mengurangi **kemiskinan, kesenjangan**, dan **pemerataan** kesejahteraan

Memerangi **inefisiensi** dan **korupsi**



Pembiayaan **Sustainability**

Reformasi sektor keuangan, e.g. Melalui pendalaman pasar keuangan

Mendukung **keuangan inklusif**

Diimbangi dengan **stabilitas sistem keuangan**

REFORMASI FISKAL YANG KOMPREHENSIF UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN, BELANJA YANG BERKUALITAS, SERTA PEMBIAYAAN YANG SUSTAINABLE